

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD BINA HARAPAN SEMARANG

Eka Sari Setianingsih¹, Ikha Listyarini²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar^{1,2}

Universitas PGRI Semarang^{1,2}

Email: ekasari129@yahoo.com

Abstract: The implementation of inclusive education enables children with special needs to learn together with the normal students in regular schools. The study aimed to analyze the implementation of inclusive education at Bina Harapan Semarang Elementary School. The method in this study was descriptive qualitative analysis. Subjects were students, teachers, and employees/staff. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. To check the validity of the data, the researcher used data triangulation techniques. The results showed that the implementation of inclusive education at Bina Harapan Semarang Elementary School was not by the provisions. It was due to the absence of a decree on the appointment of the implementation of inclusive education so that the fulfillment of various supporting components for the implementation of inclusive education had not been fully fulfilled. And it was also found that school license was to administer the inclusive education, but in fact the curriculum used was a regular curriculum, all students in schools were dominated by children with special needs, teachers did not have special education skills, there were no common perceptions about children with special needs, teachers were still not considered sensitive and proactive yet to the special needs of children. Suggestions are needed to evaluate school licensing and implementation of school administration, human resources in teaching, acceptance of new students, and awareness of all parties to be actively involved in various activities to support the implementation of inclusive education.

Keywords: implementation, inclusive education, children with special needs, elementary school.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka jalan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Pendidikan inklusi secara khusus diartikan sebagai sebuah upaya penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi dan anak normal untuk belajar. Adanya pendidikan inklusi artinya sekolah tersebut harus mampu mengakomodasi setiap anak tanpa kecuali, baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, bahasa, budaya, etnis, minoritas dan berbagai hal lainnya. Tujuannya adalah tidak ada kesenjangan di antara anak kebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Diharapkan pula anak dengan kebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan

bagi semua termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi ABK. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak *difabel* dengan anak-anak *non-difabel*. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok

difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok *difabel*. Sementara kelompok *difabel* sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Dalam pendidikan inklusi menempatkan ABK tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas biasa. Secara umum pendidikan inklusif dapat dikelompokkan sesuai dengan konsep pendidikan Nasional yaitu: *Pertama*, inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial dan kebutuhan khusus (kemampuan) pada semua level/jenjang pendidikan. *Kedua*, dalam sekolah inklusif menerapkan model multi input artinya tidak mengenal penolakan murid. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan yang saat ini masih cenderung menggunakan seleksi peringkat nilai hasil kelulusan. *Ketiga*, program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak. Dalam hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas bersama-sama siswa reguler dan ABK. *Keempat*, sistem evaluasi bersifat “*fair*”/adil disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang mampu mengikuti evaluasi reguler dievaluasi sesuai sistem evaluasi reguler, dengan memodifikasi instrumen jika diperlukan. Namun bagi siswa dengan program terindividualisasikan (PPI) maka evaluasi disesuaikan dengan PPI-nya. Hasil evaluasi selain dikonversi dalam bentuk kuantitatif dan berbentuk deskriptif, yang menggambarkan pencapaian kinerja. Khusus untuk ABK dengan kategori sedang dan berat hasil evaluasi bukan sebagai indikator kenaikan jenjang pendidikan lanjut, tetapi sebagai tolak ukur peningkatan potensi

kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya.

Penyelenggaraan mengenai pendidikan inklusi secara lebih jauh terjamin dan diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Mewajibkan setiap daerah dapat menyelenggarakan sekolah inklusi. Paling tidak dalam satu kecamatan memiliki minimal satu SD dan satu SMP yang menyelenggarakan sekolah dengan sistem inklusi. Hal tersebut juga berimplikasi pada pendidikan prasekolah yang salah satu tujuannya adalah menyiapkan mental dan fisik anak didik untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Padmonodewo, 2003: 59).

Pendidikan inklusi dalam perkembangannya memiliki beberapa istilah yang berbeda, diantaranya : *Special Education*, Pendidikan Integratif, dan Pendidikan Bagi. Leman menyatakan bahwa ada banyak definisi pendidikan inklusi yang berkembang di masyarakat, dan memiliki interpretasi yang kadang-kadang salah atau *misinterpretation*, seperti kelas segregatif yang di dalamnya berisi anak dengan tingkah laku bermasalah dikatakan telah melaksanakan pendidikan inklusi (Leman, 2007: 23).

Terdapat guru pembimbing khusus (GPK) yang diharapkan berkompetensi untuk mendampingi dan membimbing untuk dapat lebih baik. Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak terlepas dari partisipasi keseluruhan tenaga pengajar yang ada di sekolah. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memungkinkan siswa meraih potensi mereka (Friend & William, 2015: 5). Hallahan et al. (2009: 53) mengemukakan pengertian pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusi menyamakan dengan anak normal lainnya.

Menurut Staub dan Peck dalam Tarmansyah (2007: 83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan,

sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK). Seperti yang telah disampaikan bahwa pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Pendidikan inklusi meliputi tiga macam pelayanan yaitu 1) pengajaran yang dirancang secara khusus, 2) layanan terkait, 3) bantuan dan jasa pelengkap, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) pengajaran yang dirancang secara khusus (SDI), dibuat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa penyandang *disabilitas*. SDI dipantau secara cermat dan setiap kemajuan yang berkaitan dengan pengajaran harus didokumentasikan (Friend & William, 2015: 5). 2) Layanan Terkait, Siswa penyandang *disabilitas* juga

juga dapat memperoleh layanan terkait, yaitu bantuan di luar pengajaran akademis yang memungkinkan siswa untuk memperoleh manfaat dari pendidikan khusus seperti terapi bicara/bahasa dan terapi okupasional. 3) Bantuan dan Jasa Pelengkap (SAS), Bantuan dan jasa pelengkap atau *supplementary aids and service (SAS)* merupakan suatu susunan luas atas berbagai bantuan yang memungkinkan siswa penyandang *disabilitas* untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan umum, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan sekolah lainnya agar mereka dapat dididik bersama dengan teman sebaya yang bukan penyandang *disabilitas*. Pengkategorian dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu bersifat sementara (*temporer*) dan yang bersifat menetap (*permanen*): a) bersifat sementara (*temporer*), yang bersifat sementara (*temporer*) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat boleh jadi akan menjadi permanen. b) bersifat menetap (*permanen*), yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan.

Komponen-komponen pendidikan yang tercakup dalam sekolah inklusi perlu dikelola. Komponen-komponen pendidikan tersebut mencakupi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan manajemen layanan

khusus (Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008: 6-9). Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusi yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusi yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan yakni memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (sesuai dengan kebutuhan) dan *snowball* (pengumpulan data secara lebih mendalam), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010: 15). Subjek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subjek penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, sehingga memahami konteksnya (Spreadley, 1997 : 4). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di SD Bina Harapan Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subjek penelitian yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010: 203).

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam hal ini yang diwawancarai adalah subjek penelitian dan informan. Dokumen adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012: 244). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-18), yakni bahwa dalam teknik analisa data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pendirian SD Bina Harapan didasari dan diinspirasi oleh nilai-nilai hakiki kemanusiaan seperti persamaan hak, keadilan, kebebasan, kejujuran dan kebaikan. Setiap anak dengan kondisi apapun adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi manusia yang wajib diterima secara universal. SD Bina Harapan Semarang berdiri pada tahun 2000. Ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya SD Bina Harapan, diantaranya yaitu: 1) Menyediakan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang berkesulitan belajar, 2) Memberikan hak dan

kesempatan yang sama bagi anak-anak lambat belajar agar dapat belajar secara optimal.

SD Bina Harapan Semarang merupakan salah satu SD di Semarang Kota yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meskipun belum mempunyai SK Penunjukan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tingkat SD, secara formal perizinan SD Bina Harapan adalah Sekolah Inklusi namun pada kenyataannya yang kami temukan di lapangan adalah bahwa SD Bina Harapan didominasi oleh siswa ABK sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler. Hal ini menjadi rancu, berikut merupakan pernyataan Kepala Sekolah mengenai hal tersebut: “Kami sendiri bingung dengan status sekolah kami, kenyataan bahwa sekolah kami bukan sekolah inklusi karena siswa kami semua mayoritas bahkan 99% adalah siswa ABK dengan kategori ketunaan ringan, meskipun perizinan sekolah kami adalah sekolah inklusi nyatanya kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum reguler sedangkan siswanya siswa ABK, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang tidak jelas.....”.

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah di atas tampak bahwa Kepala sekolah sudah memahami bahwa bahwa konsep pendidikan inklusi memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi ‘Pendidikan untuk Semua’, dan ‘Peningkatan mutu sekolah’. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berprestasi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Setiap tahun siswa yang mendaftar di SD Bina Harapan justru selalu anak-anak berkebutuhan khusus saja, anak-anak normal tidak ada yang mendaftar sehingga ini tidak sesuai dengan kategori sekolah inklusi yang semestinya menjadi sekolah yang menampung semua siswa tanpa membedakan.

Pendidikan inklusi bagi belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya

memasukkan *disabled children* ke sekolah regular dalam rangka *give education right and kemudahan access education, and againt discrimination*. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.

Kenyataan di atas tentu saja tidak sesuai dengan prinsip dasar pendidikan inklusi yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (2007: 4) bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Sedangkan di SD Bina Harapan Semarang tidak demikian keadaannya. Berikut adalah kondisi sekolah:



Gambar1. Kondisi SD Bina Harapan Semarang

Layanan pendidikan inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus di SD Bina Harapan Semarang belum bisa maksimal, sebab mekanisme manajemen yang digunakan masih menggunakan mekanisme manajemen sekolah regular sedangkan mayoritas siswa di SD Bina Harapan Semarang adalah siswa ABK. Padahal dalam penyelenggaraan

pendidikan inklusi harus menggunakan manajemen pendidikan inklusi baik dari segi kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan/ dana, lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat) serta layanan khusus.

Seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2008: 6-9), bahwa pengelolaan komponen pendidikan dalam sekolah inklusi meliputi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan (7) manajemen layanan khusus.

Berikut merupakan masing-masing implementasi manajemen pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang:

1. Implementasi Manajemen Kesiswaan

Dalam hal penerimaan siswa baru, Kepala sekolah SD Bina Harapan Semarang akan menentukan apakah siswa yang bersangkutan diterima atau tidak berdasarkan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa dalam kategori ringan dan sedang, karena pada kenyataannya yang mendaftar tiap tahun adalah kategori bukan siswa reguler. Apabila termasuk dalam kategori ringan sampai sedang maka akan diterima, tetapi apabila dalam kategori berat akan disarankan sekolah di SLB. Berikut merupakan suasana pembelajaran di salah satu kelas:



Gambar 2. Suasana Pembelajaran di dalam Kelas

SD Bina Harapan Semarang bukan sekolah inklusi berdasarkan SK Penunjukkan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi maka penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus

dilakukan berdasarkan kebutuhan di masyarakat. Apabila merujuk pada Permendiknas No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras, bahwa penerimaan siswa berkebutuhan khusus pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah, satuan pendidikan tersebut harus mengalokasikan kursi siswa (*quota*) paling sedikit satu (1) siswa yang memiliki kelainan dalam satu rombongan belajar yang akan diterima dan paling banyak disesuaikan dengan kekuatan dan daya dukung sekolah. Program bimbingan dan penyuluhan diadakan berdasarkan kebutuhan siswa, yakni SD Bina Harapan Semarang telah bekerjasama dengan UNIKA untuk mengadakan tes psikologi dan USM pada setiap semester akan diadakan pembekalan bagi guru SD Bina Harapan terkait dengan kebutuhan dalam melayani anak berkebutuhan khusus di Sekolah.

Menurut Kustawan (2012: 62-63) hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa (metode, media dan sumber belajar). Dalam proses pembelajaran guru harus mampu mengajar setiap siswa anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya dalam setting kelas. Kegiatan pembelajaran setting pendidikan inklusi antara lain menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).

Guna mengetahui kondisi dan kebutuhan diperlukan proses *screening* atau *assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap siswa dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif (Delphie, 2006: 1). Di SD Bina

Harapan Semarang hal ini belum dilakukan mengingat tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya keterbatasan pengetahuan guru tentang pendidikan inklusi, semua proses pembelajaran dan pelayanan kepada ABK diberikan berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam menghadapi siswa ABK.

Prinsip umum pembelajaran inklusi meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika siswa berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui program pembelajaran individual.

2. Implementasi Manajemen Kurikulum

Idealnya Kurikulum yang dimaksudkan mencakup kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan/atau Kabupaten/kota. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum kelas reguler yang disesuaikan (dimodifikasi) dengan kemampuan awal dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Model pengembangan kurikulum tersebut dinamakan dengan jenis model modifikasi (Kemendiknas, 2010: 75-77). Komponen berupa aspek pembelajaran yang dimodifikasi terletak pada empat komponen utama pembelajaran yaitu silabus, RPP, dan sistem evaluasi.

Kurikulum yang dimiliki SD Bina Harapan Semarang masih menggunakan yang masih sama sehingga kebutuhan dan penanganan siswa ABK belum bisa

terakomodir dengan baik padahal semua siswa termasuk siswa ABK.

Berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Siswa yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Selain itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa. Begitu pula dengan penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Bagi siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Bagi siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah Standar Nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Karena anak berkebutuhan khusus menggunakan standar kurikulum nasional untuk siswa reguler maka standar penilaian siswa ABK pun harus menggunakan standar penilaian siswa reguler, akibatnya anak berkebutuhan khusus tidak lulus, karena tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang bersangkutan.

3. Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan antara lain adalah 1) inventarisasi pegawai, 2) pengusulan formasi pegawai, 3) pengusulan pengangkatan, 4) mengatur usaha kesejahteraan, 5) mengatur pembagian tugas. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah inklusi sebagian besar sama dengan sekolah reguler meliputi guru, laboran, dan teknis sumber belajar.

Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan *flexible curriculum* dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.

Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai. Masih terjadi kesalahan praktek kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus masih sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, *resource* dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.

Kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*. Lebih khusus, tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah inklusi adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus (GPK). Di SD Bina Harapan Semarang semua hal tersebut belum dilakukan karena keterbatasan banyak hal. Manajemen tenaga pendidikan dilakukan sesuai dengan standar reguler. Serta keterbatasan guru reguler pada pemahaman siswa ABK hanya diperoleh berdasarkan keseharian dalam menangani anak berkebutuhan khusus (otodidak).

Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum

terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.

Berikut adalah foto interaksi antara guru dengan anak berkebutuhan khusus:



Gambar 3. Suasana Pembelajaran di kelas

Untuk menambah wawasan guru-guru regular maka sekolah sesekali secara rutin sesuai alokasi anggaran yang dimiliki akan mengirim 2 guru tiap 3 bulan sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pendampingan ABK dan pendidikan inklusi. Serta pihak sekolah telah bekerjasama dengan fakultas psikologi USM dan UNIKA, dalam 6 bulan sekali dari pihak kampus akan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dan karyawan atau staf TU yang ada di SD Bina Harapan Semarang. Sehingga jika sewaktu proses pembelajaran di kelas guru membutuhkan bantuan pendamping maka staf TU akan membantu mendampingi beberapa siswa di kelas.

4. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana

Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Anak berkebutuhan khusus perlu menggunakan sarana prasarana khusus sesuai dengan jenis kekhususan atau kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Manajemen sarana

prasarana sekolah inklusi bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan serta penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar (KBM) baik untuk siswa regular maupun siswa ABK.

Sarana dan prasarana di SD Bina Harapan Semarang belum memenuhi standar sarpras yang sebagaimana tercantum dalam Permendiknas, hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi dana untuk penyediaan sarpras bagi siswa ABK. Serta peralatan sarpras ABK yang tergolong mahal menyulitkan sekolah untuk memenuhinya. Beberapa kali SD Bina Harapan Semarang mendapatkan BOP dan beasiswa pendidikan inklusi, dan dari pembayaran SPP dialokasikan untuk pemenuhan sarpras. Sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus aksesibel bagi semua siswa khususnya siswa ABK. Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang termasuk orang yang memiliki hambatan fisik. Gambar topografi sekolah SD Bina Harapan Semarang:



Gambar 4. Kursi dan Meja Salah Satu Anak Berkebutuhan Khusus

5. Implementasi Manajemen Keuangan/Dana

Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu dialokasikan dana khusus untuk 1) kegiatan identifikasi input siswa, 2) modifikasi kurikulum, 3) insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, 4) pengadaan sarana prasarana, 5) pemberdayaan peran serta masyarakat, 6) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain.

Setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah inklusi di Jawa Tengah belum memasukkan implementasi program pendidikan inklusi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Biaya yang diperoleh untuk implementasi pendidikan inklusi didapatkan dari dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana yang diperoleh umumnya digunakan untuk memberikan beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus maupun biaya tambahan bagi guru mata pelajaran yang merangkap menjadi guru pendamping khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus.

Manajemen keuangan/ dana di SD Bina Harapan Semarang masih menggunakan standar regular. Artinya bahwa belum ada alokasi dana khusus untuk memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa ABK. Beberapa kali SD Bina Harapan Semarang mendapatkan BOP

dan beasiswa pendidikan inklusi, dan dari pembayaran SPP dialokasikan untuk pemenuhan sarpras.

6. Implementasi Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

Sekolah sebagai suatu sistem sosial, sekolah merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Kemajuan sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, makin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Sebaliknya, makin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di suatu daerah, akan makin mundur pula sumber daya masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah.

Kepala SD Bina Harapan Semarang selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua wali siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah, termasuk untuk menangani siswa ABK. Tetapi meskipun demikian karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, banyak diantara anggota komite yang ikut serta mempercayakan saja semua keputusan pada pihak sekolah.

7. Implementasi Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus di SD Bina Harapan Semarang dilakukan dalam hal-hal khusus. Contohnya: untuk membantu siswa ABK dalam kebutuhan khusus maka akan diberikan layanan dan treatment khusus pada siswa yang bersangkutan oleh psikolog yang hadir ke sekolah dalam seminggu sekali, terjadwal siapa saja siswa yang akan mendapatkan pelayanan dan treatment khusus pada minggu itu maka psikolog yang ada akan memberikan layanan tersebut sesuai ketunaan siswa. Layanan khusus pada penyelenggaraan

pendidikan inklusi dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusi akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan ketunaannya.

PENUTUP

Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi bagi (ABK) di SD Bina Harapan Semarang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SK Penunjukkan Penyelenggara Pendidikan Inklusi sehingga pemenuhan berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi belum bisa terpenuhi secara maksimal. Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini semakin diterima dan berkembang cukup pesat, namun dalam tataran implementasinya masih dihadapkan kepada berbagai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Kurikulum yang digunakan di SD Bina Harapan Semarang adalah kurikulum regular sedangkan mayoritas siswa adalah anak berkebutuhan khusus sedangkan guru-guru yang ada adalah guru regular yang minim pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, adapun pengetahuan dan pelayanan guru yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di SD Bina Harapan Semarang bersifat otodidak karena penanganan keseharian/kebiasaan menangani anak berkebutuhan khusus sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat dalam memperoleh segala haknya sebagai warga Negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal. Pemerintah terkait perlu memperjelas dan mengelola serta meninjau kembali perizinan

serta implementasinya di sekolah dan membuat regulasi yang secara khusus menangani penyelenggaraan pendidikan inklusi terkait dengan kenyataan bahwa di sekolah mayoritas siswa adalah ABK sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler. Guru harus meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusi dan pendampingan secara mendalam kepada anak berkebutuhan khusus. Masyarakat umum terlibat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai perwujudan tanggung jawab bersama pendidikan untuk semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Departemen Pendidikan Nasional.2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*.
- Delphie, B. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusi; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
- Friend, M. & William D.B. 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan prkatis untuk mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallahan, D.P., James M.K., and Paige C.P. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Heller, K.A., Wayne H.H., & Samuel M. 1982. *Placing Children in Special Education: A Strategy for Equity*. Washington, DC: National Academy Press.
- Hildegum, O. 2003. *Pendidikan Inklusi Suatu Strategi Manuju Pendidikan Untuk Semua* (Materi Lokakarya) Mataram : Direktorat PSLB.
- Ishartiwi. 2010. “Implementasi Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional”. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol. 6 No. 1. Mei 2010, hlm. 1 – 9.
- Kustawan, D. 2012. *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Leman. 2007. *Psikologi Eksperimen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L.J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patmonodewo. 2003. *Pendidikan anak pra sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Praptingrum, N. 2010. “Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi ”. *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 7. No. 2, November 2010, hlm 32 – 39.
- Reid, G. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher.
- Rudiyati, S. 2012. “Substansi Komponen Kompetensi Guru Sekolah Inklusi bagi Anak Berkelainan/Berkebutuhan Pendidikan Khusus”. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Tahun 16, Nomor 2, 2012, hlm. 533 – 552.
- Sherrill, C. 1981. *Adapted physical education and recreation a multidisciplinary approach (2nd ed.)*. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company Publishers.
- Spreadley. 1997. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. London: David Fulton Publisher.

- Sudira, P. 2011. “*Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Menyongsong Skill Masa Depan*”. Makalah Pengembangan Kurikulum Politeknik Negeri, Bali-Oktober 2011. Hlm. 1 – 24.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukinah. 2010. Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol.7 No.2 November 2010: 50.
- Sukmadinata, N.S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparno. 2008. *Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Tarmansyah. 2009. “Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusi)”. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume IX No.1 April 2009, hlm. 1 – 16.